



HUMAN
RIGHTS
WATCH

“Kau Sudah Kubeli”

Kekerasan dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Perempuan
di Uni Emirat Arab



“Kau Sudah Kubeli”

**Kekerasan dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga
di Uni Emirat Arab**

Hak cipta © 2014 Human Rights Watch

All rights reserved.

Dicetak di Amerika Serikat

Desain sampul: Rafael Jimenez

Human Rights Watch membela hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami menyelidiki kejahatan, mengungkap fakta ke publik, dan mendesak para penguasa untuk menghormati hak asasi dan menjamin keadilan. Human Rights Watch organisasi internasional yang independen, kerjanya merupakan bagian dari gerakan besar bagi penegakan martabat manusia dan mendorong hak asasi manusia untuk semua.

Human Rights Watch memiliki staf di lebih dari 40 negara, berkantor di Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Jenewa, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moskow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunisia, Washington DC, dan Zurich.

Untuk informasi lengkap, kunjungi situs kami: <http://www.hrw.org>



“Kau Sudah Kubeli”

Kekerasan dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga di Uni Emirat Arab

Ringkasan	1
Temuan Penting.....	2
Rekomendasi	7
Untuk pemerintah UEA.....	7
Untuk pemerintah negara pengirim buruh migran	7

Ringkasan

Pekerjaannya tak seperti yang saya harapkan. Sangat berbeda. Saya bangun pagi-pagi, langsung masak, lalu bersihkan rumah, cuci pakaian, masak lagi. Tak ada istirahat, sama sekali tak ada istirahat... karena majikan perempuan terus berteriak. Saya menangis dan minta dikembalikan ke agen, tapi majikan saya bilang, “Kau sudah kubeli”...
—Farah S., buruh rumah tangga asal Indonesia, 23 tahun, wawancara di Dubai, 7 Desember 2013

Setidaknya ada 146.000 pekerja rumah tangga perempuan—mungkin lebih—yang bekerja di Uni Emirat Arab (UEA). Para agen perekrut di negara asal mereka, kebanyakan dari Asia dan Afrika, memikat perempuan-perempuan ini dengan gaji besar dan kerja enak. Agen perekrut meyakinkan bahwa pekerjaan ini bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan, membiayai pendidikan, memperbaiki rumah, berobat, dan hal-hal penting lainnya. Sadiyah A., pekerja rumah tangga asal Filipina berusia 36 tahun, bilang pada Human Rights Watch bahwa dia menganggap bekerja di UEA adalah “kesempatan emas.”

Bermigrasi demi pekerjaan tentu bisa memberi peluang emas, asal hak asasi para pekerja dihargai. Sebagian buruh perempuan domestik di UEA mendapat majikan baik dan bertanggungjawab, kondisi kerja bagus, digaji penuh dan tepat waktu, serta mampu mengirim uang untuk keluarga mereka.

Tapi ada banyak kasus dimana para majikan di UEA dan agen-agen perekrutnya menganiaya pekerja rumah tangga perempuan. Para pekerja yang diwawancarai Human Rights Watch untuk kepentingan laporan ini menguraikan pelbagai siksaan yang mereka alami. Majikan menyita paspor, menyiksa secara fisik, dan mengurung mereka di rumah. Ada pula majikan tak bayar gaji penuh, memaksa mereka bekerja berjam-jam tanpa waktu istirahat atau libur, maupun majikan menolak memberi makanan, hidup, dan kesehatan layak. Beberapa buruh migran mengalami kerja paksa dan perdagangan manusia.

Bagi Sadiyah, kenyataan yang dialaminya sebagai buruh migran di UEA jauh dari “kesempatan emas” yang dia harapkan. “Saya tidak diberi hari libur, tidak boleh tidur sampai mereka (majikan) tidur, dan mereka tidak bayar gaji saya,” katanya kepada Human Rights Watch.

UEA, yang pertumbuhan ekonominya digerakkan oleh minyak dan perdagangan, telah lama menjadi magnet bagi kaum buruh migran. Ia merupakan satu dari 10 negara terkaya dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 383,8 milyar dolar AS (setara Rp 3838 trilyun). Sebagian besar dari PDB ini berasal dari pekerja migran yang mencapai 7,3 juta jiwa. Pekerja migran dari Filipina, Indonesia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Ethiopia berjumlah signifikan namun acapkali diabaikan. Jumlah mereka ditaksir 88,5 persen dari penduduk UEA. Pemerintah UEA harus menjamin hak-hak pekerja dari eksploitasi dan penyalahgunaan sesuai hukum internasional.

Temuan penting

Laporan ini mendokumentasikan pelbagai kekerasan terhadap perempuan yang bermigrasi ke UEA untuk pekerjaan rumah tangga. Saat rekrutmen, ketika bekerja, juga saat mencari bantuan atau menggugat ganti-rugi atas penyalahgunaan yang dialami. Ia menjelaskan permasalahan pada praktik perekrutan dan sempitnya payung hukum bagi pekerja di UEA. Ini memfasilitasi terjadinya kekerasan.

Laporan berdasarkan wawancara Human Rights Watch dengan 99 pekerja rumah tangga perempuan di UEA pada November hingga Desember 2013. Mereka menuturkan pelbagai pelanggaran serius yang dialami karena sistem *sponsorship* visa UEA, dikenal *kafala*, serta minimnya perlindungan hukum di bawah undang-undang tenaga kerja UEA.

Di UEA, sistem *kafala* mengikat pekerja migran kepada majikan tunggal yang berperan sebagai sponsor visa. Ia membatasi para pekerja mengganti majikannya. Sistem ini memberi kekuasaan penuh pada majikan, karena mereka bisa mencabut sponsor kapan saja. Ia otomatis menghapus hak seorang pekerja di UEA dan memicu prosedur pemulangan.

Para pekerja rumah tangga diabaikan dari undang-undang tenaga kerja UEA. Mereka juga diabaikan dari sejumlah perlindungan mendasar yang dijamin undang-undang serta kebijakan ketenagakerjaan bagi pekerja, seperti batas jam kerja dan ketentuan upah lembur. Kaum buruh migran nyaris tak punya perlindungan hukum yang mengatur pekerjaan mereka. Otoritas UEA telah sekian tahun mempertimbangkan rancangan undang-undang tenaga kerja rumah tangga tapi hingga kini belum sekalipun menyusun draft publik, apalagi mengesahkan. Media memberitakan draft ini berisi perlindungan

yang lebih lemah bagi pekerja rumah tangga dibandingkan dengan buruh migran lain dalam undang-undang tenaga kerja.

Otoritas UEA telah memperbarui beberapa aspek dari sistem *kafala* dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengenalkan perlindungan hukum perburuhan untuk kategori tenaga kerja migran tertentu, tetapi tidak untuk pekerja rumah tangga.

Sejumlah negara pengirim buruh telah memulai langkah-langkah untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya yang pergi keluar negeri demi pekerjaan rumah tangga. Namun ia tak cukup memberi perlindungan penuh terhadap kekerasan dan eksploitasi di UEA. Pemerintah UEA wajib menjalankan hukum internasional guna mengatasi dan mengganti-rugi pelbagai kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di negaranya, juga bekerjasama dengan negara pengirim buruh guna mencegah kekerasan dan eksploitasi tersebut.

Puluhan buruh rumah tangga menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka mengalami kekerasan di tangan agen perekrut maupun majikan di UEA. Dalam banyak kasus, misalnya, para agen dan majikan “mengganti” kontrak baru bagi buruh yang telah meneken surat kontrak sebelum meninggalkan negara asalnya, menuntut mereka bekerja dengan bayaran rendah dan kondisi buruk. Otoritas UEA mengevaluasi standar kontrak pekerjaan bagi buruh rumah tangga pada Juni 2014, yang hasilnya menjamin satu hari libur dalam seminggu dan 8 jam rehat selama 24 jam. Namun revisi ini dinilai kurang dari apa yang dijanjikan kepada sebagian besar pekerja saat mereka direkrut dari negara asalnya. Ia juga jauh dari standar internasional. Bahkan standar kontrak yang lebih tegas tidak bisa mengganti hukum perlindungan terhadap tenaga kerja.

Lebih dari dua lusin pekerja rumah tangga mengungkapkan pada Human Rights Watch bahwa majikan mereka melakukan kekerasan fisik dan seksual. Salah seorang menceritakan majikan memelintir lengannya sangat kuat. Yang lain menuturkan majikan memperkosanya. Mayoritas pekerja rumah tangga menerangkan majikan melecehkan mereka secara verbal dengan memanggil mereka “keledai” atau “binatang.”

Hampir semua pekerja rumah tangga, yang diwawancarai Human Rights Watch mengeluhkan jam kerja yang panjang, hingga 21 jam per hari. Majikan mempekerjakan mereka tanpa istirahat dan hari libur. Kebanyakan buruh bekerja untuk keluarga besar dan

dituntut memenuhi bermacam tugas, seperti memasak, membersihkan rumah, menjaga anak dan manula, serta berkebun.

Banyak yang mengeluh majikan tidak membayar gaji tepat waktu atau penuh. Yang lain mengatakan hampir tak pernah terima upah, hanya sekali selama hampir tiga tahun.

Banyak pekerja rumah tangga menuturkan majikannya membatasi kebebasan bergerak dan melarang mereka berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga yang mereka layani. Majikan menahan paspor—ini menjadi rintangan utama bagi pekerja yang ingin melepaskan diri dari majikan yang kejam. Penyitaan paspor merupakan pelanggaran hukum di UEA. Sementara otoritas UEA mensyaratkan majikan menahan paspor pekerjanya ketika membatalkan visa *sponsorship* atau melaporkan pekerjanya “melarikan diri.” Sejumlah pekerja mengatakan majikan menguncinya di dalam rumah selagi bekerja. Yang lain menceritakan majikan mengambil telepon seluler dan melarang atau membatasi mereka menelepon keluarga.

Para pekerja juga melaporkan tak layaknnya makanan, hidup, dan akses kesehatan. Seorang perempuan berkata, majikannya tak mengizinkan dia makan selama tiga hari sebagai “hukuman” karena pekerjaannya “tak memuaskan.” Beberapa pekerja menerangkan majikan menolak memberi pengobatan saat mereka sakit atau terluka. Banyak pekerja rumah tangga berkata, mereka dipaksa tidur di tempat yang tidak pantas, termasuk di gudang, kamar sepen, atau ruang tamu.

Sejumlah pekerja yang diwawancara Human Rights Watch mengalami penyiksaan yang tergolong kerja paksa dan perdagangan manusia. Hukum di UEA memidanakan praktik kerja paksa dan perdagangan, kendati sangat jarang diterapkan. Human Rights Watch tidak menemukan kasus dimana otoritas UEA menghukum majikan yang melakukan kerja paksa terhadap buruh rumah tangga.

Para pekerja rumah tangga tidak mendapat perlindungan. Pemerintah UEA memberi perlindungan bagi perempuan korban perdagangan seksual atau kekerasan domestik, tapi tidak untuk pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Sejumlah kedutaan memberi perlindungan bagi warga negaranya, namun banyak pula yang tidak melakukannya. Hukum UEA memidanakan mereka yang “menyembunyikan” seorang pekerja migran tanpa visa yang sah, termasuk pekerja yang kabur karena dianiaya

majikan. Hukumannya bisa denda atau penjara. Pekerja yang mengalami kekerasan menuturkan, agen perekrut setengah hati membantu mereka, dan dalam beberapa kasus memaksa mengembalikan mereka kepada majikan yang menyiksanya atau memindahkan ke majikan baru tanpa konsultasi dengan pekerja. Beberapa agen perekrut berkata kepada buruh rumah tangga bahwa mereka tidak bisa memulangkan kecuali mengganti biaya tinggi perekrutan yang telah dibayar sponsor. Beberapa lagi berkata, para agen mengurung mereka di tempat kediaman agen dan tidak memberi makanan atau memukul mereka saat mencari bantuan.

Pemerintah UEA menganggap pekerja rumah tangga yang meninggalkan majikannya tanpa izin sama dengan “melarikan diri.” Mereka dituduh melakukan pelanggaran administratif yang bisa menyebabkan deportasi dan larangan kerja pada masa mendatang. Buruh rumah tangga yang lari dari tempat kerjanya karena melepaskan diri dari kekerasan atau alasan lain, juga menghadapi risiko majikan akan mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka. Sejumlah pekerja menuturkan pada Human Rights Watch, selagi mereka kabur dan berusaha mengadukan majikannya pada polisi atau imigrasi karena melakukan kekerasan, mereka sadar kalau majikannya siap melaporkan tuduhan palsu bahwa mereka mencuri. Dalam banyak kasus, tuduhan itu bertujuan mengintimidasi pekerja agar upahnya ditangguhkan atau mencabut pengaduan tentang sederet kekerasan yang mereka alami. Dalam kasus lain, pekerja rumah tangga menghadapi pengadilan.

Pekerja rumah tangga juga mendapat respon beragam dari kantor imigrasi atau kepolisian saat mereka melaporkan kekejaman majikannya. Agen perekrut, pejabat negara asal buruh, maupun majikan cenderung berkata positif mengenai peran departemen imigrasi maupun polisi dalam memediasi kasus buruh migran. Namun, pekerja mengatakan polisi biasanya menganjurkan mereka yang mengalami siksaan kembali ke majikan yang telah menyiksanya. Para buruh mengeluh mengenai penundaan dan pelbagai masalah lain saat mereka berusaha menuntut ganti-rugi melalui jalur pengadilan. Ini membuat sebagian pekerja mengabaikan upaya menuntut ganti-rugi yudisial karena prosesnya panjang dan mereka tak diizinkan bekerja selama proses ini. Banyak pekerja rumah tangga akhirnya berhenti kerja demi pulang ke rumah tanpa bayaran dan keadilan.

Human Rights Watch mengajukan sejumlah permintaan informasi dan pertemuan pada otoritas UEA guna membahas masalah yang dihadapi pekerja rumah tangga, namun tak ada respon hingga kini.

UEA, seperti negara Teluk lain, punya catatan panjang tentang pelanggaran hak-hak buruh rumah tangga menurut hukum hak asasi manusia internasional dan undang-undang tenaga kerja. Mereka gagal memberi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan kekerasan. Organisasi Buruh Internasional (ILO), para pakar maupun sejumlah badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak negara-negara Teluk, termasuk UEA, mengakhiri sistem *kafala* sekaligus menjamin utuh hak pekerja rumah tangga sesuai undang-undang tenaga kerja.

Meski demikian, UEA berupaya mengambil langkah terdepan mengenai isu migrasi tenaga kerja di lingkup internasional. Ia memprakarsai Dialog Abu Dhabi pada 2008 agar tercapai kesepakatan regional dalam mengatur migrasi kaum pekerja. Pemerintah UEA telah berkontribusi signifikan dalam mendanai Inisiatif Global PBB Melawan Perdagangan Manusia. Pada Juni 2014, negara-negara sahabat memilih UEA sebagai Dewan Pelaksana ILO.

Saat ini juga momen penting bagi UEA secara global untuk memberi jaminan hak-hak pekerja rumah tangga. Pada Juni 2014, mayoritas negara anggota ILO menyepakati sebuah protokol baru yang mengelaborasi perlindungan menentang kerja paksa, suatu kejahatan yang dialami banyak pekerja rumah tangga. Namun pemerintah UEA maupun negara Teluk lain tak satupun mengadopsi protokol ini. UEA memilih abstain. UEA mendukung konvensi ILO tentang pekerja rumah tangga yang berlaku pada 2013, tetapi sejauh ini belum diratifikasi. Hukum maupun praktik pemerintah UEA telah gagal memenuhi persyaratan konvensi tersebut. Pada saat laporan ini ditulis, 15 negara telah meratifikasi konvensi itu dan lebih dari 30 negara lain menerapkan reformasi untuk mematuhi pasal-pasal dalam konvensi.

Pemerintah UEA harus berperan sebagai pemimpin global terhadap isu migrasi tenaga kerja. Dan untuk itu, ia harus sesegera mungkin meratifikasi perjanjian-perjanjian penting internasional, termasuk konvensi ILO tentang pekerja rumah tangga dan protokol kerja paksa, serta mereformasi undang-undang dan praktik tenaga kerja di dalam negeri.

Para pekerja rumah tangga yang bermigrasi ke UEA telah memberikan jasa vital bagi keluarga-keluarga di UEA. Mereka tidak harus menyerahkan nasibnya pada kemurahan hati agen perekrut dan para majikan berkelakuan buruk. Pemerintah UEA harus bersikap tegas melawan eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan harus dilakukan sekarang juga.

Rekomendasi

Untuk pemerintah UEA

- Mereformasi sistem sponsorship *kafala* dengan mencabut atau mengamandemen semua pasal dan regulasi dalam UU Federal No. 6 tahun 1973 tentang Izin Masuk dan Tempat Kediaman Warga Negara Asing dan aturan pelaksanaannya. Ini memudahkan pekerja rumah tangga mengganti pekerjaan tanpa perlu persetujuan majikan dan tidak kehilangan status sah imigrasinya. Mencabut sanksi tindakan “melarikan diri” termasuk menghapus hukuman deportasi dan larangan bekerja di masa mendatang.
- Tegakkan larangan menahan paspor pekerja. Beri sanksi para majikan dan agen perekrut yang melanggar larangan ini. Sahkan sebuah aturan hukum yang secara tegas mempidanakan orang yang menahan paspor.
- Amandemen dan sahkan draft undang-undang tenaga kerja rumah tangga. Pastikan ia menyediakan perlindungan yang setara dengan undang-undang tenaga kerja lain di UEA dan sesuai dengan Konvensi ILO tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.
- Ratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan Protokol 2014 atas Konvensi ILO tahun 1930 tentang Kerja Paksa.
- Lakukan kampanye informasi publik secara rutin untuk memberitahukan pekerja rumah tangga atas hak-hak dan tanggungjawabnya di bawah hukum UEA. Berikan rincian informasi dan kontak bagi sumber bantuan. Buat informasi ini tersedia dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa negara penyumbang terbesar pekerja rumah tangga di UEA.
- Secara rutin menginformasikan para majikan atas hak dan tanggungjawabnya sesuai hukum UEA, termasuk menerapkan hukuman bagi mereka yang berperilaku kejam terhadap pekerja rumah tangga.

Untuk pemerintah negara pengirim buruh migran

- Perkuat jajaran staf dan pelatihan para pegawai di kedutaan dan konsulat di UEA untuk membantu pekerja rumah tangga asal negaranya yang dilanggar haknya.

- Menginformasikan pekerja rumah tangga tentang hak-haknya sesuai hukum negara asalnya dan hukum UEA. Peduli tentang fasilitas pendukung dan bantuan hukum yang tersedia bagi mereka. Pastikan semua pekerja yang memegang visa perjalanan juga diberi informasi kontak kedutaan atau konsulat negara asal buruh migran di UEA.
- Perkuat kerjasama dengan otoritas UEA dalam hal mengawasi proses perekrutan, validitas kontrak kerja, dan menyelesaikan perselisihan tenaga kerja. Perkuat pula koordinasi terkait kasus-kasus dugaan perdagangan manusia, kerja paksa, dan perbudakan.

“Kau Sudah Kubeli”

Kekerasan dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Perempuan di Uni Emirat Arab

Setidaknya ada 146.000 pekerja rumah tangga perempuan—mungkin lebih—yang bekerja di Uni Emirat Arab (UEA). Mereka berasal dari Filipina, Indonesia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Ethiopia, dan negara lain yang mengalami berbagai kekerasan dan eksploitasi dari majikan dan agen perekrutnya.

“Kau Sudah Kubeli”: *Kekerasan dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Perempuan di Uni Emirat Arab*, mendokumentasikan sistem *sponsorship* visa (dikenal *kafala*) yang mengikat buruh migran pada majikannya dan bagaimana pekerja rumah tangga diabaikan dari perlindungan hukum tenaga kerja sehingga mengalami kekerasan. Laporan juga mengungkap pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan sulit mendapat pemulihan, termasuk minim penampungan, hukuman “melarikan diri,” dan gagalnya sistem peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara 99 pekerja rumah tangga perempuan, agen perekrut, majikan, dan narasumber lainnya di UEA, laporan ini mendokumentasikan tindakan sewenang-wenang yang dialami pekerja rumah tangga. Penyitaan paspor, gaji tak dibayar, kurang waktu rehat dan hari libur, dikurung di rumah majikan, beban kerja berat dan jam kerja panjang, kebutuhan makanan tak dipenuhi, serta kekerasan psikologis, fisik, dan seksual. Pada sebagian kasus, mereka mengalami kerja paksa atau perdagangan manusia.

Pemerintah UEA terus berperan dalam isu tenaga kerja internasional. Pada 2014, ia bergabung pada dewan eksekutif Organisasi Buruh Internasional (ILO). Namun di dalam negeri, UEA masih pakai sistem *kafala* yang eksploitatif, gagal mengesahkan rancangan undang-undang tentang hak pekerja rumah tangga yang ditunda sejak 2012, dan belum meratifikasi sejumlah perjanjian penting internasional tentang hak buruh migran dan pekerja rumah tangga.

Human Rights Watch mendesak reformasi sistem *kafala* dan penerapan hukum perlindungan buruh serta langkah penting lain untuk perlindungan utuh hak-hak pekerja rumah tangga.



Seorang pekerja rumahtangga dari luar negeri bersama seorang anak di bawah papan iklan di Uni Emirat Arab.

© 2006 Abbas/Magnum Photos